

LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI
(LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunianya, sehingga Laporan Pertanggung jawaban Bupati (LKPJ) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar (DPMPTSP) dapat di susun.

Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bupati (LKPJ) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada pelaksana pemerintahan dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Tersusunnya LKPJ Tahun 2023 ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal meskipun masih terdapat kekurangan disebabkan adanya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2023.

Semoga LKPJ Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini dapat bermanfaat terutama untuk bahan evaluasi bagi yang berwenang untuk menilai kinerja staf dalam Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 19 Januari 2024

Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.2. Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi	2
1.3. Jumlah aparatur sipil negara, kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, dan Jumlah Pejabat Struktural	6
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	8
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	8
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	9
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	15
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	16
2.1.4. Analisis kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	17
2.1.5. Inovasi	17
2.1.6. Prestasi dan Penghargaan	19
2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbub, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah	23
2.3. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021	24
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	25
3.1 Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan	25
3.2. Hambatan- Hambatan	25
BAB IV PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) awalnya kelembagaan setingkat Kantor yaitu Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (KPTPM) dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010. Seiring dengan dinamika tuntutan pelayanan Publik yang Prima dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang kondusif bagi investasi, Status Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPTPM) ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengalami beberapa kali perubahan terakhir kali berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.1. Gambaran Umum Dinas PMPTSP

Dinas PMPTSP sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

- a) Peringkat : B
- b) Alamat : Jalan Jend. Achmad Yani Mal Pelayanan Publik (MPP) Benteng Kab. Kepulauan Selayar
- c) Email : dpmptsptk.selayar@gmail.com
- d) Titik koordinat : S 6,11924, E 120,467141
- e) Foto kantor



1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kepala Dinas PMPTSP mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan Dinas PMPTSP yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyiapan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Tugas Kepala Dinas PMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
7. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. menyelenggarakan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
9. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
10. menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

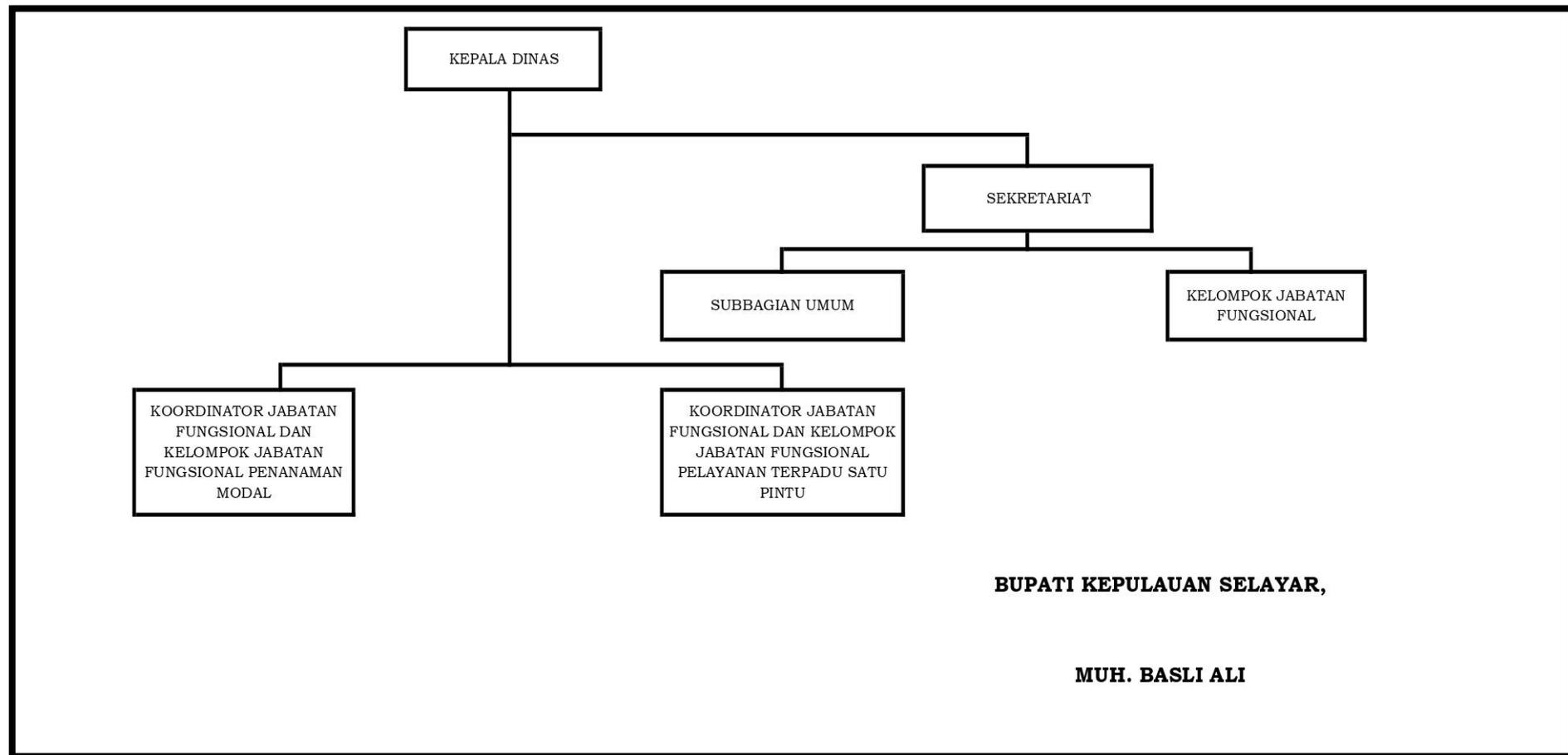
11. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
3. Bidang Penanaman Modal;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Dinas PMPTSP merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Keadaan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan Tahun 2023 sebagai berikut :

- JPTP = 0 orang
 - Administrator (Kelas 12) = 1 orang
 - Administrator (Kelas 11) = 1 orang
 - Pengawas = 3 orang
 - Pelaksana = 15 orang
 - Fungsional = 6 orang
- Jumlah = 26 orang**

Untuk mengetahui sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1 :

Tabel 1.1

Susunan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Selayar
Berdasarkan Komposisi Golongan dan Eselon
Per Desember 2023

No	Tingkat pendidikan	Golongan			Jumlah	Eselon				Jumlah	Pegawai Kontrak	Pegawai Sukarela
		IV	III	II		II	III	IV	Staf			
1	Strata Dua (S2)	2	2	-	4	1	2	-	2	5	-	-
2	Strata Satu (S1)	2	11	-	13	-	1	1	11	13	16	-
3	Diploma	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
4	SLTA	1	3	4	8	-	-	-	7	7	6	-
Jumlah		5	17	4	26	1	3	1	21	26	22	-

Sumber data : Subag. Umum, Kepeg. dan Keuangan Dinas PMPTSP Kab. Kepulauan Selayar Tahun Desember 2023

Berdasarkan alokasi jumlah pegawai yang tersedia sebagaimana dalam tabel 1.1 tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah presentatif hanya saja jika dilihat dari segi pendidikannya Sebagian belum sesuai kualifikasi dengan jabatannya.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Penanaman Modal dan Layanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai peran penting dalam berdirinya suatu usaha karena tanpa adanya surat izin berusaha maka usaha tersebut bisa di katakana illegal dengan adanya izin usaha dan investasi serta pelatihan kepada masyarakat maka dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 ini adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Raencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar. Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 5.466.536.022,- dengan rincian belanja operasi Rp. 5.466.536.022,- dan Belanja modal Rp. 0,-, selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD, anggaran keseluruhan berubah menjadi Rp. 4.183.533.850,- dengan rincian belanja Operasi Rp. 4.172.811.850,- dan belanja modal Rp. 10.722.000,-. Perubahan anggaran ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Dari total anggaran sebesar Rp. 4.183.533.850,- anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp. 3.956.374.035,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 227.159.815,- dengan realisasi keuangan sebanyak 94,57%. Program dan kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun yang direncanakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub

Kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 6 Program, 12 Kegiatan, dan 33 sub Kegiatan.

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Dinas PMPTSP

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Urusan Bidang Penanaman Modal	Dinas PMPTSP		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70,28%	60,77 %			
					85,00%	94,57%			
					Rp. 3.244.109.850,-	Rp. 3.174.498.335,-	97,85 %		
				a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
					25.000.000,-	23.680.000,-	94,72%		
					1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		
					3.000.000,-	3.000.000,-	100 %		
					2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					5.000.000,-	4.391.000,-	87,82 %		
					3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen		
					5.000.000,-	5.000.000,-	100 %		
					4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3.000.000,-	2.289.000,-	76,30 %		
					5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		
					3.000.000,-	3.000.000,-	100 %		
					6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan		
					2.000.000,-	2.000.000,-	100 %		
					7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan		
					4.000.000,-	4.000.000,-	100 %		
					b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
2.422.750.000,-	2.363.722.621,-	97,56 %							
1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan							
2.409.750.000,-	2.350.722.621,-	97,55 %							
2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen							
4.000.000,-	4.000.000,-	100 %							
3) Koordinasi dan Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan							

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	4.000.000,-	4.000.000,-	100 %		
				4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15 Dokumen	15 Dokumen			
					5.000.000,-	5.000.000,-	100 %		
				c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%			
					6.679.000,-	6.679.000,-	100 %		
				1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
					4.000.000,-	4.000.000,-	100 %		
				2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen			
					4.000.000,-	4.000.000,-	100 %		
				3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			
					4.000.000,-	4.000.000,-	100 %		
				d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
					262.216.900,-	262.215.566,-	99,99 %		
				1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	2 Paket			
					10.006.900,-	10.006.800,-	99,71 %		
				2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					5.100.000,-	5.100.000,-	100 %		
				3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan			
					247.110.000,-	247.108.766,-	100 %		
				e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
					10.722.000,-	10.722.000,-	100%		
				1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 Unit	2 Unit			
					10.722.000,-	10.722.000,-	100%		
				f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
					420.834.950,-	413.743.148,-	98,31		
				1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Laporan	3 Laporan			
					146.212.750,-	144.106.948,-	98,56 %		
				2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 Laporan	3 Laporan			
					274.622.200,-	269.636.200,-	98,18 %		
				g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	32 unit	32 unit			
					90.586.000,-	88.365.000,-	97,55 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Pemerintahan Daerah					
				1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit 20.800.000,-	12 Unit 19.015.000,-	91,42 %		
				2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	25 Unit 31.710.000,-	25 Unit 31.369.000,-	98,92%		
				3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 jenis 5.016.000,-	1 jenis 5.016.000,-	100 %		
				4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit 33.060.000	2 Unit 32,965.000-	99,71 %		
				Program Promosi Penanaman Modal	240 Perusahaan 340.000.000,-	1.878 339.437.200,-	99,83 %		
				Kegiatan Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	3 Kali 340.000.000,-	7 Kali 339.437.200,-	99,83 %		
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen 340.000.000,-	3 dokumen 339.437.200,-	99,83 %		
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	52.000 469.500.000,-	76.286 319.688.000,-	66,98 %		
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	52.000 469.500.000,-	76.286 319.688.000,-	66,98 %		
				1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	204 Pelaku Usaha 348.090.000,-	251 Pelaku Usaha 221.640.800,-	59,59 %		
				2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha 121.410.000,-	79 Kegiatan Usaha 92.815.000,-	76,45 %		
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	40% 50.000.000,-	60% 48.321.900,-	96,64 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
					50.000.000,-	48.321.900,-	96,64 %		
				1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
					50.000.000,-	48.321.900,-	96,64 %		
				Program pelayanan Penanaman Modal	100%	100%			
					187.678.000,-	187.651.400,-	99,99		
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1300 izin	2.712 Izin			
					71.932.000,-	71.695.800,-	99,67		
				1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1300 Pelaku Usaha	1878 Pelaku Usaha			
					44.938.000,-	44.732.500,-	99,54		
				2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	13 Kegiatan Usaha	13 Kegiatan Usaha			
					13.510.000,-	13.510.000,-	100 %		
				3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	-		
					13.484.000,-	13.453.300,-	99,77 %		
				4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-			
					0,-	0,-	0 %		
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%			
					7.992.000,-	7.965.000,-	99,66 %		
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang	100%	100%			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.992.000,-	7.965.000,-	99,66 %		
				1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12 Dokumen	15 Dokumen			
					7.992.000,-	7.965.000,-	99,66 %		

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas PMPTSP

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)	Ket.
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
	Dinas PMPTSP					
	Urusan Penanaman Modal					
	1. Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	%	65,00	60,77	93,49 %	
	2. Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100 %	
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	%	72,50 %	78,30	108,00 %	
	4. Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	%	6,00	782,50	130,41 %	
	5. Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	%	10,00	413,51	3.938,19 %	Sumber : Data Sementara Dinas PMPTSP, 31 Desember 2023. Menunggu Data Resmi dari Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan
	6. Persentase peningkatan nilai investasi PMA	%	4,00	857,5	21.437,5 %	Sumber : Data Sementara Dinas PMPTSP, 31 Desember 2023. Menunggu Data Resmi dari Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan
	7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	%	84,00	85,28	101,49	

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan Dinas PMPTSP

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	Urusan Penanaman Modal					
	Dinas PMPTSP					
	1. Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	200	1.878	939,00 %	
	2. Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	(Rp Juta)	59.000	76.286	129,29%	
	3. Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah	%	50,00	60%	120%	
	4. Persentase Izin yang diterbitkan	%	100	100	100	
5. Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	%	100	100	100		

2.1.4. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja

Tabel 2.4. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	$5=4-3$	$6=(4/3)*100$	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	4.183.533.850	3.956.374.035	227.159.815	94,23	6	93,49	12	95,91
	Dinas PMPTSP	Rp. 4.183.533.850	Rp. 3.956.374.035	Rp. 227.159.815	94,23	6	93,49	12	95,91

2.1.5. Inovasi

1. Program Inovasi PMPTSP

Tabel 2.5. Program Inovasi PMPTSP

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1	Investment Project Ready to Offer (IPRO) Pengembangan Kawasan Minapolitan	IPRO Kawasan Minapolitan Selayar adalah mengembangkan konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisien, berkualitas dan percepatan.	<ol style="list-style-type: none">1. Memperoleh gambaran uraian latar belakang dan gambaran umum dari pendirian, pengembangan dan pengoperasian bidang usaha pada proyek investasi2. Memperoleh gambaran uraian tentang kemungkinan (alternatif) bentuk badan hukum Indonesia yang dapat didirikan dalam rangka pendirian, pengembangan dan pengoperasian bidang usaha pada proyek investasi.3. Meningkatkan produktivitas serta kualitas produk kelautan dan perikanan;4. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;5. Meningkatkan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja; dan6. Mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.7. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan;8. Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan; dan meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi daerah, regional, dan nasional.	

2.1.6. Prestasi dan Penghargaan

a. Proposal IPRO Pengembangan Kawasan Minapolitan Selayar (KMS)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kembali melaksanakan kegiatan South Sulawesi Investment Challenge (SSIC) pada tahun 2023. Kegiatan ini merupakan flagship program Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan (PINISI SULTAN) dan bertujuan untuk melakukan identifikasi proyek potensial Kabupaten/Kota di Sulsel yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun asing. Kegiatan SSIC 2023 dilaksanakan pada 31 Juli 2023 di Kota Makassar dengan mengangkat tema “*strengthening a fast-growing, inclusive and sustainable economy*”.

Kegiatan SSIC 2023 mengundang 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan untuk menyampaikan proposal Investment Project Ready to Offer (IPRO). Rangkaian kegiatan SSIC 2023 telah dimulai sejak 25 Mei 2023 untuk pengumpulan proposal. Selanjutnya, juga telah dilaksanakan proses seleksi, verifikasi lapangan, dan coaching presentasi IPRO. Finalis SSIC 2023 melakukan presentasi dihadapan dewan juri, penilaian akhir menghasilkan 3 (tiga) pemenang yang berhasil meraih predikat proposal IPRO terbaik yaitu:

1. Terbaik pertama Kabupaten Bantaeng dengan proposal IPRO Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng Pabrik Baterai Litium (KIBA);
2. **Terbaik kedua Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Proposal IPRO Pengembangan Kawasan Minapolitan Selayar (KMS), dan;**
3. Terbaik ketiga Kabupaten Sinjai dengan proposal IPRO Industri Pengalengan Ikan Sarden.

Tabel 2.6.
Prestasi dan Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Tingkat			Kabupaten	Ket.
		Inter-nasional	Nasional	Provinsi		
1.	Proposal IPRO Pengembangan Kawasan Minapolitan Selayar (KMS), pada Even “South Sulawesi Investment Challenge (SSIC) Award 2023”			✓	Kepulauan Selayar	Peringkat 2 (dua)



Gambar 2.1. Dokumentasi Pelaksanaan SSCI 2023



Gambar 2.2. Dokumentasi Pelaksanaan SSCI 2023



Gambar 2.3. Dokumentasi Pelaksanaan SSCI 2023

b. Penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022



Gambar 2.4.

Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022

Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar meraih Penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2022 dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia yang diterima pada acara “Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023”.

Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI, yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung. Penilaian tersebut juga dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nilai 84,02 (Zona Hijau) termasuk Kategori A (Kualitas Tertinggi).

2. Realisasi Program Inovasi

Realisasi yang telah mulai dilaksanakan di tahun 2023 dalam mewujudkan program inovasi Dinas PMPTSP adalah:

a. IPRO Pengembangan Kawasan Minapolitan Selayar (KMS)

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengajak seluruh stakeholder terkait baik pemerintah daerah dan pusat maupun swasta untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pengembangan sektor perikanan melalui program pembangunan **Kawasan Minapolitan Selayar**.

Maksud dari Pengembangan Kawasan Minapolitan Selayar adalah untuk mengembangkan konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisien, berkualitas dan percepatan. Sedangkan tujuan dari Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Saat ini dari luas lahan seluas 51 hektar yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan yang diusulkan, semuanya masih merupakan milik masyarakat dan telah menyatakan keinginan untuk melepaskan kepemilikan lahan mereka kepada calon investor yang berminat baik melalui kesepakatan langsung maupun melalui fasilitasi pemerintah daerah. Rencana peruntukan Kawasan Minapolitan Selayar telah sesuai dengan Perda No. 5 Thn 2012 Tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar.



2.5. Gambar Masterplan Pengembangan Investasi Selayar



2.6. Gambar Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbub, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah

Kebijakan yang diambil meliputi kebijakan peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah yang menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah

NO	Dasar Hukum		Nama OPD
	Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang	
1.	PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023/ 13 Juli 2023	Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi	Dinas PMPTSP
2.	SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 279/IV/TAHUN 2023	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dinas PMPTSP
3.	SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 230/IV/TAHUN 2023	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dinas PMPTSP

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
1.	Intens melakukan sosialisasi terhadap pentingnya administrasi perizinan bukti pemilik sah suatu usaha karena kurangnya kepedulian dan partisipasi Masyarakat dalam tertib administrasi perizinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Bimtek/Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, serta pemantauan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan; b. Menginisiasi Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 230/IV/Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 	Telah dilaksanakan sosialisasi Tertib administrasi perizinan dan non perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Diharapkan kepada semua Perangkat Daerah agar melakukan penertiban penganggaran terkait kegiatan orientasi PPPK yang seharusnya hanya terpusat kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	<ul style="list-style-type: none"> c. Dinas PMPTSP tidak memiliki kegiatan orientasi PPPK pada tahun 2023; d. Melaksanakan himbuan kepada <i>Stakeholder</i> DPMPTSP tentang penertiban penganggaran terkait kegiatan orientasi PPPK yang hanya terpusat kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 	Telah terjadi penertiban penganggaran terkait kegiatan orientasi PPPK yang terpusat kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan

3.2. Hambatan-Hambatan

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dan Penugasan”

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2023 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah. Anggaran Dinas PMPTSP pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.183.533.850,- anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp. 3.956.374.035,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 227.159.815,- dengan realisasi keuangan sebanyak 94,57%. Program dan kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun yang direncanakan.

Harapan kami agar penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban bisa memenuhi prinsip tepat waktu dan di susun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Meskipun harus diakui belum seluruhnya diterapkan, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Atas kekurangan-kekurangan ini, Insya Allah kami perbaiki, tentunya dengan senantiasa berusaha melakukan perbaikan di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keterangan pertanggungjawaban ini. Semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 adalah ***"Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"*** setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Benteng, 19 Januari 2023


Kepala Dinas PMPTSP,
Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022